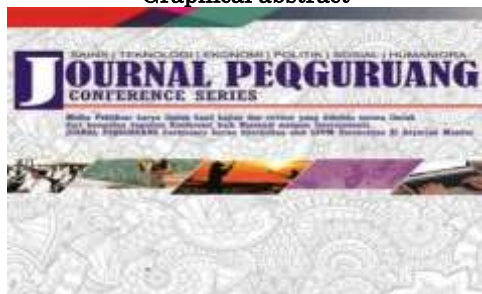


Graphical abstract



## EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.

<sup>1</sup>Marthen,<sup>2</sup>Muhammad Massyat,<sup>3</sup>Muhammad Syaeba,  
<sup>1</sup>Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author

[marthen.mrt@gmail.com](mailto:marthen.mrt@gmail.com)

[muh.massyat@mail.unasman.ac.id](mailto:muh.massyat@mail.unasman.ac.id)

[syaebanunasman07@gmail.com](mailto:syaebanunasman07@gmail.com)

### Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the procurement process of goods and services at the Regional Secretariat of Mamasa Regency in Realizing Transparent Governance. This type of research is qualitative research with a case study approach. The data sources in this study were 15 informants. Data collection was carried out by observing, interviewing, and documenting. The analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Mamasa Regency, the implementation of procurement of goods and services showed quite good effectiveness in terms of systems and regulations, supported by digital frameworks such as RUP, SPSE, LPSE, and SIPD. Timeliness is still hampered by document revisions and delays in providers, while the quality is mostly according to specifications although there are discrepancies in consulting services and electronic goods. Procurement is declared to be compliant with the budget with documented realization, and transparency is facilitated online, although public participation is low due to limited digital literacy. Supervision has been carried out through routine audits and evaluations, but still needs to be strengthened in technical and participatory aspects. Overall, procurement has a good structure and system, but improved coordination, HR capacity, user involvement, and technology-based supervision are still needed for optimal effectiveness and accountability.

**Keywords:** Effectiveness, goods and services, Mamasa Regency Regional Secretariat and Governance

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses pengadaan barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kabupaten Mamasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menunjukkan efektivitas yang cukup baik dari sisi sistem dan regulasi, didukung oleh kerangka digital seperti RUP, SPSE, LPSE, dan SIPD. Ketepatan waktu masih terhambat oleh revisi dokumen dan keterlambatan penyedia, sementara kualitas sebagian besar sesuai spesifikasi meski terdapat ketidaksesuaian pada jasa konsultasi dan barang elektronik. Pengadaan dinyatakan patuh anggaran dengan realisasi terdokumentasi, dan transparansi difasilitasi secara daring, meskipun partisipasi publik rendah akibat literasi digital yang terbatas. Pengawasan telah berjalan melalui audit dan evaluasi rutin, namun masih perlu penguatan pada aspek teknis dan partisipatif. Secara keseluruhan, pengadaan telah memiliki struktur dan sistem yang baik, namun peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, pelibatan pengguna, dan pengawasan berbasis teknologi masih diperlukan untuk efektivitas dan akuntabilitas yang optimal.

**Kata Kunci :** Efektivitas, barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dan Tata Kelola Pemerintahan

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6553

Received : 2025-08-13/ Received in revised form : 2025-11-26 Accepted : 2025-11-27

## 1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk membangun administrasi publik yang efisien dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki peranan yang sangat vital sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya pengadaan yang terkelola dengan baik, maka kebutuhan instansi pemerintah dapat dipenuhi tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta menggunakan anggaran secara efisien. Oleh karena itu, kesuksesan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mencerminkan secara langsung kualitas tata kelola pemerintahan (Augustine, 2024).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur secara ketat melalui regulasi yang berlaku untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Salah satu regulasi terbaru yang mengatur proses ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menggantikan Perpres No. 16 Tahun 2018. Perpres ini mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas dan mempercepat pelaksanaan pengadaan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pengadaan di instansi pemerintahan, termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas proses pengadaan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien, dan memberikan dampak positif bagi pemerintahan daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah sering menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi prosesnya. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya koordinasi antar unit kerja, kendala teknis dalam penerapan sistem e-procurement, serta rendahnya partisipasi penyedia lokal. Tantangan tersebut sering kali menimbulkan keterlambatan pelaksanaan, ketidaksesuaian spesifikasi, serta minimnya akses publik terhadap informasi pengadaan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan menghambat upaya mewujudkan transparansi yang diharapkan. Dengan meningkatkan efektivitas dalam proses pengadaan, diharapkan dapat tercapai pengelolaan anggaran yang lebih baik, mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan, serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi (Mutasari et al., 2022).

Di Kabupaten Mamasa, terutama di lingkungan Sekretariat Daerah, proses pengadaan barang dan jasa masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Menurut data internal Sekretariat Daerah tahun 2024, pelaksanaan pengadaan mengalami keterlambatan mencapai 20% dari total proyek, yang

sebagian besar disebabkan oleh masalah administratif dan teknis. Selain itu, transparansi informasi dalam proses lelang dinilai kurang memadai, terutama pada tahap evaluasi penawaran yang kurang terbuka kepada publik. Partisipasi penyedia lokal juga masih terbatas, yang berdampak pada kompetisi dan kualitas barang serta jasa yang disediakan. Masalah-masalah ini menjadi fokus utama dalam evaluasi efektivitas pengadaan di Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, yang mencakup semua tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah yang lebih optimal.

Berdasarkan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan, serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memperkuat mekanisme pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Efektivitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dalam konteks tata kelola pemerintahan yang transparan. Lokasi penelitian ini terletak di Sekretariat Daerah kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, Indonesia.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan 30 Mei 2025, dan proses pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator krusial dalam menilai efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, termasuk di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian PBJ dan jajaran pelaksana pengadaan, diketahui bahwa proses penjadwalan kegiatan pengadaan telah disusun sejak awal tahun anggaran melalui

penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh masing-masing OPD. Jadwal pelaksanaan pengadaan didasarkan pada dokumen tersebut serta dokumen perencanaan kegiatan lainnya. Dalam praktiknya, sistem SPSE dan dashboard internal telah digunakan untuk mengelola tahapan pengadaan secara elektronik dan real-time. Sebuah penelitian oleh (Nuska, 2023) menunjukkan bahwa peran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memastikan ketepatan waktu pengadaan melalui sistem SPSE yang efisien. Selain itu, penelitian oleh (Purba, 2020) menyarankan bahwa pengendalian yang kuat terhadap pengadaan barang, yang didukung oleh sistem LPSE dan RUP, dapat menjamin ketepatan waktu serta menghindari penyimpangan dalam pengadaan. Ini sangat relevan dengan pengadaan barang di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa yang telah mengintegrasikan sistem SPSE untuk memonitor proses secara real-time. Diharapkan, dengan menggunakan sistem ini, pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana tepat waktu dan transparan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah daerah

Meskipun struktur dan sistem pendukung telah tersedia, pelaksanaan pengadaan belum sepenuhnya berjalan tepat waktu. Keterlambatan masih sering terjadi, terutama pada pengadaan yang bersifat teknis atau konstruksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pengajuan dokumen dari OPD teknis, perubahan spesifikasi secara mendadak, serta pergantian personel panitia pengadaan. Bahkan pada proyek strategis, keterlambatan dapat berdampak besar terhadap pelayanan publik. Keterlambatan pengadaan alat kesehatan atau perlengkapan perkantoran, misalnya, dapat menghambat operasional layanan masyarakat secara langsung.

Upaya untuk mengatasi keterlambatan telah dilakukan oleh Bagian PBJ dengan mendorong OPD agar menyusun RUP tepat waktu, serta menyusun SOP khusus untuk pengadaan cepat. Evaluasi internal juga dilakukan apabila terjadi deviasi waktu dari jadwal. Beberapa informan mengungkapkan pentingnya koordinasi lintas unit antara PBJ dan OPD pengguna anggaran dalam menjaga ketepatan waktu pelaksanaan. Meskipun demikian, disiplin internal dan pembinaan terhadap OPD masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas proses pengadaan.

Dari perspektif pengguna layanan barang dan jasa, ketepatan waktu pengadaan juga menjadi perhatian utama. Informan menyatakan bahwa meskipun permintaan kebutuhan telah diajukan sejak akhir tahun sebelumnya, proses pengadaan sering kali baru terealisasi setelah DPA disahkan. Keterlambatan dalam proses pengadaan berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kegiatan seperti pelatihan, distribusi alat, atau acara resmi dapat tertunda hanya karena barang belum tersedia tepat waktu.

Kelemahan lainnya yang diidentifikasi dari wawancara dengan para pengguna layanan adalah minimnya akses terhadap informasi progres pengadaan. Sebagian besar hanya mendapatkan informasi melalui komunikasi informal seperti telepon

atau pesan WhatsApp, tanpa akses langsung ke sistem monitoring. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan progres dan menciptakan ketergantungan pada staf pengadaan. Keadaan ini tidak hanya memperlambat respon pengguna terhadap kendala yang muncul, tetapi juga menurunkan rasa kepemilikan terhadap proses pengadaan secara keseluruhan. Sesuai dengan Studi oleh (Kalupe et al., 2025) dalam *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* mengenai optimalisasi pengadaan barang/jasa di era digital di Provinsi Gorontalo, secara implisit menyoroti tantangan dan peluang dalam transformasi digital pengadaan. Meskipun tidak secara spesifik membahas "minimnya akses informasi progres", penelitian ini menggarisbawahi perlunya adaptasi terhadap teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan akan sistem monitoring yang terintegrasi dan dapat diakses untuk meminimalisir keterlambatan respons

Pengadaan yang tidak tepat waktu juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat menjadi curiga ketika ada keterlambatan distribusi alat atau kelengkapan kegiatan, apalagi jika kegiatan tersebut bersifat strategis atau disorot oleh media. Ketidaktertiban jadwal pengadaan juga dapat menciptakan citra bahwa pemerintah kurang profesional dan tidak tanggap dalam merespons kebutuhan operasional.

Perubahan mendadak terhadap spesifikasi dari OPD dan kurangnya disiplin dalam merespon permintaan data oleh OPD teknis menjadi penyebab dominan keterlambatan. Pengguna layanan berharap adanya pelibatan aktif dalam proses monitoring serta pelatihan bagi OPD terkait sistem pengadaan elektronik agar koordinasi menjadi lebih efektif. Keinginan agar pengguna dapat memantau langsung progres pengadaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterbukaan proses secara horizontal, bukan hanya vertikal.

Secara keseluruhan, meskipun infrastruktur sistem pengadaan seperti SPSE dan SIRUP telah tersedia dan digunakan, tantangan utama dalam mewujudkan ketepatan waktu terletak pada koordinasi lintas unit, kedisiplinan penyampaian dokumen, dan kurangnya pelibatan pengguna secara aktif. Efektivitas pengadaan barang dan jasa dari sisi ketepatan waktu belum sepenuhnya optimal, dan keterlambatan masih berdampak pada jalannya program-program pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan berupa peningkatan komunikasi antarunit, penguatan pelatihan teknis pengadaan, serta peningkatan aksesibilitas informasi progres kepada seluruh pihak terkait demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.

### **3.2. Kualitas**

Kualitas pengadaan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, termasuk di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian PBJ, pengadaan secara umum telah memenuhi standar yang ditentukan. Namun, terdapat tantangan pada jenis pengadaan yang

sifatnya abstrak seperti jasa konsultansi, di mana kualitas hasilnya sulit diukur secara objektif. Hal ini menjadi titik kritis dalam menjaga efektivitas pengadaan karena aspek non-fisik sering kali diabaikan dalam proses penilaian mutu. Sebuah penelitian oleh (Muhammad, 2020) mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan di daerah, terutama untuk jenis pengadaan jasa yang lebih sulit diukur secara kuantitatif. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh (Supusepa, 2020), yang menunjukkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa, terutama jasa konsultansi, kualitas dapat diukur dengan indikator yang lebih kompleks, yang mencakup baik aspek fisik maupun non-fisik. Penelitian ini menekankan pentingnya pengukuran yang tepat untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut pejabat pengelola pengadaan seperti Bapak SOLEMAN, SP., MM Dan ERWIN MARIRI, ST, kualitas pengadaan yang baik dapat dicapai melalui perencanaan spesifikasi yang ketat serta penerapan sistem e-purchasing yang membantu memilih penyedia yang kredibel. Pengadaan bernilai besar atau strategis cenderung menunjukkan kualitas yang lebih stabil karena didukung oleh proses perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, pada pengadaan dengan nilai kecil, efisiensi anggaran sering kali menjadi prioritas sehingga kualitas barang cenderung minimal, meskipun masih berada dalam batas spesifikasi.

Meskipun secara umum kualitas telah sesuai dengan kontrak, beberapa staf teknis seperti Bapak Tadius dan Bapak BRANDES, S.IP mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan minor dalam aspek finishing atau merek barang. Pada beberapa kasus, keterlambatan distribusi dan penyedia yang kurang kompeten menjadi penyebab turunnya kualitas barang. Apabila perbedaan tersebut berdampak pada keselamatan atau efisiensi kerja, pihak PBJ biasanya segera melakukan permintaan revisi atau klarifikasi terhadap penyedia. Namun, apabila selisih hanya bersifat estetis atau administratif, barang tetap diterima selama memenuhi batas spesifikasi minimum.

Kritik terhadap kualitas pengadaan juga datang dari para pengguna layanan. Sebagian besar menyatakan bahwa barang-barang rutin seperti ATK, meja, atau kursi umumnya diterima dalam kondisi yang baik. Namun, pada barang elektronik dan jasa pelatihan, banyak ditemui ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Beberapa pengguna melaporkan bahwa barang cepat rusak, tidak sesuai merek, atau bahkan tidak lengkap. Jasa konsultansi atau pelatihan dinilai tidak relevan dengan kebutuhan teknis, dan output-nya dianggap formalitas semata, tanpa memberikan nilai tambah signifikan. Sebuah penelitian oleh (Siregar, 2021) mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara kualitas layanan yang diharapkan dengan yang diterima sering menjadi sumber ketidakpuasan pelanggan, terutama pada barang elektronik dan jasa konsultansi. Hal ini menyoroti pentingnya penyesuaian antara harapan

pengguna dan kualitas barang atau jasa yang diberikan dalam pengadaan pemerintah.

Permasalahan lain yang teridentifikasi dari sisi pengguna adalah lemahnya pengawasan mutu. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penerimaan barang hanya dilakukan dengan pengecekan fisik secara visual, tanpa adanya uji teknis yang mendalam. Proses penerimaan cenderung dilakukan cepat, dan umpan balik tidak selalu terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian kecil seringkali terlewatkan, dan kualitas barang atau jasa yang diterima tidak sepenuhnya mencerminkan spesifikasi awal. Celah ini menjadi risiko serius terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengadaan.

Ketiadaan uji mutu dan lemahnya mekanisme validasi kualitas tidak hanya berdampak pada internal pemerintahan, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Kualitas pengadaan yang rendah sering kali diasosiasikan dengan praktik yang tidak transparan, ketidaktepatan penggunaan anggaran, atau lemahnya pengawasan. Beberapa pengguna bahkan menyatakan bahwa publik bisa kehilangan kepercayaan ketika barang pengadaan cepat rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, terutama dalam konteks pelayanan publik. Sebuah penelitian oleh (Rahmadhanis, 2024) mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam hal pengendalian mutu dan validasi, dapat memicu persepsi negatif dari masyarakat. Hal ini terkait dengan pengawasan yang kurang optimal dan transparansi anggaran yang tidak terjaga, yang akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel, aspek kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia dan PPK, tetapi juga pengguna barang dan jasa. Keterlibatan aktif pengguna dalam proses penerimaan barang, pengisian formulir umpan balik, serta pengawasan fungsional terhadap barang atau jasa yang diterima menjadi elemen penting yang harus diperkuat. Hal ini juga termasuk kebutuhan akan pelatihan dan sosialisasi internal mengenai pentingnya pengawasan mutu, serta pelibatan semua unit kerja dalam menjaga standar mutu pengadaan.

Dengan demikian, meskipun kualitas pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa secara umum telah memenuhi spesifikasi kontraktual, masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan teknis, kejelasan spesifikasi awal, dan pelibatan pengguna. Ketidakkonsistenan dalam mutu, terutama pada barang dan jasa non-rutin, menunjukkan bahwa efektivitas pengadaan belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan kualitas pengadaan ke depan, dibutuhkan perbaikan dalam dokumentasi teknis, sistem evaluasi penyedia, serta penerapan uji mutu yang lebih ketat agar hasil pengadaan benar-benar mencerminkan prinsip efektivitas dan tata kelola yang baik.

### **3.3. Kepatuhan terhadap anggaran**

Kepatuhan terhadap anggaran merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah

yang efektif, termasuk dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, diketahui bahwa setiap proses pengadaan telah diarahkan dan dibatasi secara ketat oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tidak ada proses pengadaan yang bisa dilakukan di luar DPA, karena sistem keuangan dan pengadaan berbasis elektronik seperti SIPD dan SPSE telah mengunci setiap transaksi agar sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disahkan. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa sistem seperti SIPD dan SPSE tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap anggaran melalui kontrol yang ketat pada setiap transaksi pengadaan. Hal ini memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah (Bernika et al., 2023).

Para pejabat PBJ dan staf teknis mengungkapkan bahwa sistem pengendalian anggaran dilaksanakan secara berjenjang dan terdokumentasi secara digital. Seluruh tahapan pengadaan dicatat dalam sistem SPSE, SIPD, dan LPSE, yang memungkinkan proses pengawasan berjalan dengan transparan. Jika terjadi perbedaan antara nilai kontrak dan pagu anggaran, perbedaan tersebut lebih sering disebabkan oleh efisiensi dari hasil tender atau mekanisme e-purchasing, bukan karena pelanggaran alokasi. Dalam beberapa kasus, realisasi anggaran justru lebih rendah dari estimasi, dan hal itu dianggap sebagai penghematan yang sah.

Penjelasan dari para Kasi PBJ menunjukkan bahwa terdapat verifikasi bertingkat dari bagian keuangan, PPK, hingga Inspektorat Daerah dalam setiap tahapan anggaran. Proses ini menjamin bahwa tidak ada penggunaan anggaran yang melebihi pagu atau tanpa dasar perencanaan. Bahkan untuk revisi atau perubahan volume kegiatan, diperlukan persetujuan dari berbagai pihak dan harus didukung dengan dokumen pembanding. Hal ini menunjukkan adanya sistem kendali yang ketat dan terstruktur dalam menjaga integritas penggunaan anggaran.

Dari sisi pengguna layanan, seperti para pejabat OPD dan bagian administrasi, persepsi terhadap kepatuhan anggaran juga sangat positif. Mereka menyatakan bahwa sistem SIPD secara otomatis menolak proses SP2D apabila tidak ada dasar DPA yang valid. Hal ini menguatkan bahwa pengadaan di luar anggaran formal nyaris tidak mungkin dilakukan. Para pengguna juga secara aktif dilibatkan dalam verifikasi melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ), bukti kontrak, dan berita acara penerimaan barang.

Selain kepatuhan administratif, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan pengadaan. Beberapa informan menyebutkan bahwa hasil tender kerap menghasilkan harga satuan di bawah perkiraan, sehingga menciptakan sisa anggaran. Namun, efisiensi ini bukan disebabkan oleh pemotongan kualitas atau pengabaian kebutuhan, melainkan sebagai hasil kompetisi penyedia dalam proses lelang terbuka. Dengan demikian, penghematan anggaran bukan menjadi indikator ketidaktepatan, melainkan

keberhasilan sistem kompetitif yang dijalankan. Sebuah penelitian oleh (Kamaluddin et al., 2022) menyoroti bahwa kompetisi yang sehat dalam lelang terbuka menghasilkan efisiensi anggaran dengan memperoleh harga satuan yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa penghematan anggaran dapat dianggap sebagai hasil dari sistem kompetitif yang efektif dalam pengadaan barang dan jasa.

Aspek transparansi dalam kepatuhan anggaran turut diperkuat melalui pemanfaatan platform seperti LPSE dan dashboard digital yang tersedia. Meskipun informasi sudah dapat diakses secara terbuka, informan mengakui bahwa pemanfaatan oleh masyarakat masih sangat terbatas. Banyak masyarakat belum familiar dengan sistem yang ada, dan belum ada edukasi yang cukup untuk mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi pengadaan. Hal ini menjadi celah dalam penguatan akuntabilitas anggaran secara partisipatif.

Pengawasan terhadap kepatuhan anggaran juga dilaksanakan melalui audit internal dan eksternal. Tim Inspektorat Daerah secara rutin memeriksa laporan penggunaan anggaran, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun untuk memeriksa proyek-proyek strategis atau yang bernilai besar. Proses audit ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian dengan DPA, tetapi juga mencermati efisiensi dan kinerja pelaksanaan anggaran. Beberapa hasil audit kemudian digunakan sebagai bahan revisi sistem atau pelatihan internal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa tergolong tinggi dan sistematis. Prosedur pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi, sistem digital mendukung kontrol berlapis, dan seluruh proses diawasi secara administratif dan teknis. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan literasi unit-unit kerja terkait keterbukaan informasi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi internal dan eksternal untuk memperkuat transparansi fiskal sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

### **3.4. Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian PBJ dan pejabat pelaksana lainnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, dapat diketahui bahwa proses pengadaan telah dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. Kanal digital seperti LPSE Kabupaten Mamasa dan SIRUP LKPP menjadi sarana utama dalam menyediakan akses informasi publik, termasuk rencana umum pengadaan, dokumen tender, serta hasil pemilihan penyedia barang dan jasa. Sebuah penelitian oleh (Sholeh et al., 2024) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjamin melalui penggunaan sistem elektronik seperti SIRUP, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data pengadaan secara terbuka. Kedua sistem ini mendukung terwujudnya pengadaan yang lebih

transparan dan akuntabel di berbagai level pemerintahan.

Setiap tahapan dalam pengadaan telah dilengkapi dengan penanggung jawab yang jelas sesuai fungsi dan struktur kelembagaan. PPK bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan, pejabat pengadaan menangani pemilihan penyedia, sedangkan pengguna anggaran bertugas dalam aspek pengendalian. Akuntabilitas diperkuat melalui pelaporan berkala, audit internal dari Inspektorat Daerah, serta audit eksternal seperti BPK. Proses pelaporan, LPJ, dan sistem SPSE menjadikan setiap transaksi pengadaan dapat ditelusuri jejaknya secara digital (audit trail). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Massyaf et al., 2023) yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperlukan cascading kinerja yang selaras dengan struktur organisasi, di mana setiap unit dan pejabat memiliki target dan tanggung jawab kinerja yang jelas serta terdokumentasi. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa Pemkab Polewali Mandar menerapkan prinsip *Balanced Scorecard* (BSC) untuk menilai pencapaian kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana pelaporan kinerja dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, memudahkan proses evaluasi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, kinerja organisasi tidak hanya dinilai dari penyerapan anggaran semata, tetapi juga dari ketercapaian outcome yang terukur secara sistematis.

Walaupun sistem transparansi secara teknis sudah berjalan baik, hasil wawancara mengindikasikan adanya kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat maupun pengguna internal. Sebagian besar masyarakat umum, terutama di wilayah terpencil, belum memahami cara mengakses LPSE maupun SIRUP. Bahkan beberapa pegawai internal juga mengaku belum akrab dengan sistem yang digunakan. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan manfaat transparansi pengadaan sebagai sarana pengawasan publik yang efektif.

Para pejabat pengadaan juga mengakui bahwa pengadaan masyarakat terhadap proses pengadaan masih terbatas, baik dari jumlah maupun dari substansi. Ketika terjadi aduan, seperti ketidaksesuaian barang atau dugaan ketidakadilan dalam seleksi penyedia, pihak PBJ melakukan klarifikasi dan melibatkan Inspektorat. Namun sebagian besar aduan berkaitan dengan pelaksanaan atau keterlambatan distribusi, bukan pada proses tender itu sendiri, yang menunjukkan bahwa aspek sistem pengadaan lebih jarang dipermasalahkan.

Dari sisi pengguna layanan, mayoritas menyatakan bahwa informasi pengadaan memang tersedia secara daring dan dapat diakses publik. Namun demikian, mereka juga menggarisbawahi bahwa akses tersebut belum inklusif karena hanya dimanfaatkan oleh kalangan tertentu. Beberapa informan menyatakan bahwa meskipun LPSE dan SIRUP terbuka, masyarakat belum banyak tahu cara menavigasi atau memahami isi dokumen yang disediakan. Oleh karena itu, transparansi yang tersedia secara formal belum tentu efektif dalam praktik.

Para pengguna layanan juga menilai bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan telah

terbagi secara proporsional. Proses akuntabilitas dijalankan melalui dokumen serah terima, laporan kegiatan, serta sistem pelaporan elektronik yang diaudit secara berkala. Mereka juga dilibatkan dalam verifikasi barang dan pengisian laporan pertanggungjawaban. Hal ini memperlihatkan bahwa secara administratif, akuntabilitas telah diterapkan dalam alur kerja, meskipun belum semua pihak memahami pentingnya dokumentasi yang akurat dan tepat waktu. Sebuah penelitian oleh (Septianingsih, 2022) menyoroti bagaimana sistem e-procurement, seperti SIRUP dan LPSE, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui pelaporan elektronik dan audit berkala, sistem ini memastikan bahwa semua tahapan pengadaan terdokumentasi dengan baik, memperkuat akuntabilitas di setiap proses yang dilalui.

Salah satu rekomendasi yang muncul dari hasil wawancara adalah perlunya edukasi publik dan pelatihan internal mengenai transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang tersedia secara teknis tidak akan berdampak signifikan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemahaman dari pengguna sistem maupun masyarakat. Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menyediakan forum keterbukaan informasi, misalnya melalui sosialisasi di desa, pelatihan daring, atau penempatan petunjuk akses LPSE yang mudah dipahami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa telah memiliki sistem transparansi dan akuntabilitas yang tertanam kuat secara struktural dan digital. Seluruh proses pengadaan dapat dipantau, ditelusuri, dan dilaporkan dengan jelas. Namun, efektivitasnya dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengawasan partisipatif masih terbatas akibat kurangnya edukasi dan keterbatasan pemanfaatan akses oleh masyarakat. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, OPD, dan publik dalam mendorong penguatan budaya transparansi yang benar-benar berdampak luas.

### 3.5. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan pilar penting dalam menjamin bahwa proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penerimaan barang/jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat PBJ, evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Selain itu, untuk paket strategis, dilakukan evaluasi pascatender secara khusus guna meninjau kesesuaian dokumen, jadwal, hingga pelaksanaan fisik. Sebuah penelitian oleh (Supusepa, 2020) menekankan pentingnya prinsip pengawasan yang berlapis untuk memastikan pengadaan berjalan efektif dan efisien. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Muhammad (2020), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah.

Pengawasan dilaksanakan melalui pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pemeriksaan lapangan bersama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) maupun PPK. Proses ini juga mencakup audit dokumen administratif dan rekonsiliasi laporan dengan hasil pengadaan di lapangan. Inspektorat Daerah secara rutin melakukan audit internal, dan pada proyek-proyek bernilai besar, BPK maupun BPKP turut melakukan audit eksternal. Audit ini bukan hanya bersifat verifikatif, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran untuk perbaikan sistem.

Beberapa pejabat pengadaan menyatakan bahwa hasil evaluasi telah digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan, seperti penyesuaian dokumen pengadaan, revisi SOP, dan perbaikan sistem input kebutuhan dalam RUP tahun berikutnya. Evaluasi juga menjadi dasar untuk menyusun pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pengadaan. Hal ini menunjukkan adanya siklus umpan balik (*feedback loop*) yang positif dalam upaya meningkatkan mutu dan efektivitas proses pengadaan secara berkelanjutan.

Meski demikian, beberapa informan dari internal PBJ menyebutkan bahwa kedalaman analisis dalam proses evaluasi masih perlu ditingkatkan. Evaluasi sering kali hanya bersifat administratif atau formalitas, tanpa menggali akar masalah teknis yang terjadi di lapangan. Pelibatan lintas unit dalam proses evaluasi juga dinilai belum optimal, terutama bagi OPD pengguna yang seharusnya memiliki peran strategis dalam menyampaikan umpan balik terhadap barang atau jasa yang mereka gunakan.

Dari sisi pengguna layanan barang dan jasa, mayoritas menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam proses evaluasi, terutama melalui pengisian formulir kepuasan pengguna atau saat rapat evaluasi akhir tahun. Evaluasi ini mencakup aspek kesesuaian barang, kualitas, dan ketepatan waktu. Namun, sebagian menyampaikan bahwa pelibatan staf teknis masih minim dan hasil evaluasi sering hanya dibagikan dalam bentuk ringkasan. Padahal, staf teknis memiliki pengamatan langsung terhadap kondisi barang dan proses distribusi di lapangan.

Para pengguna juga menyatakan bahwa evaluasi telah memberikan dampak positif dalam memperbaiki proses pengadaan. Misalnya, beberapa unit kerja kini lebih teliti dalam menyusun permintaan barang dan membuat spesifikasi teknis. Beberapa pengguna juga mengapresiasi adanya rapat evaluasi pascakegiatan yang menjadi forum bersama untuk menyampaikan kendala, menyusun perbaikan sistem, serta menetapkan strategi pengadaan yang lebih tepat guna dan tidak mubazir.

Meskipun pengawasan dan evaluasi telah dilakukan secara struktural dan rutin, beberapa tantangan tetap muncul. Di antaranya adalah keterlambatan audit karena beban kerja Inspektorat yang tinggi, kurangnya pelatihan evaluasi teknis untuk OPD, serta belum adanya sistem informasi yang memungkinkan pelaporan dan evaluasi dilakukan secara digital dan interaktif. Tantangan ini menghambat optimalisasi fungsi evaluasi sebagai alat refleksi dan koreksi dalam tata kelola pengadaan. Sebuah penelitian oleh (Kusmiati, 2024) menyoroti

bahwa keterlambatan audit dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama dalam manajemen operasional pengadaan, yang mengurangi efektivitas proses evaluasi. Selain itu pentingnya penerapan sistem informasi yang efisien untuk memperbaiki pengawasan dan audit agar dapat dilakukan secara lebih interaktif dan digital.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan evaluasi dalam proses pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa telah berjalan secara sistematis, terdokumentasi, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pengadaan. Namun, efektivitasnya masih bisa diperkuat melalui peningkatan partisipasi lintas unit, pendalaman analisis evaluasi, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi. Langkah-langkah tersebut akan menjamin bahwa hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi alat perubahan nyata dalam mendukung pengadaan yang efisien, responsif, dan akuntabel.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan berbagai informan kunci di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, dapat disimpulkan bahwa secara umum, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa telah menunjukkan efektivitas yang baik dari segi sistem dan regulasi, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Keterlambatan dalam proses pengadaan, ketidaksesuaian kualitas pada beberapa barang dan jasa, serta rendahnya partisipasi publik menjadi tantangan yang perlu perhatian lebih. Meskipun pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan mekanisme yang ada, serta didukung oleh sistem digital yang transparan, koordinasi antar unit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi publik masih perlu diperbaiki guna mencapai tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan optimal.

#### 5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa meningkatkan ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa melalui perencanaan yang lebih matang, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadaan melalui pelatihan dan penerapan standar kompetensi. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi internal perlu diperkuat dengan audit konsisten, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan lembaga independen. Transparansi informasi pengadaan juga harus dibuka lebih luas kepada publik melalui portal daring dan laporan terbuka, sekaligus membangun budaya kerja yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang mengedepankan empati, keandalan, dan daya tanggap.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Augustine, A. A. (2024). Public Procurement in Local Government: A Tool for Good Governance, Value Creation, and Sustainable Development. *International Journal of Management and Economics Invention*, 10(8), 3474–3486.

- Bernika, F., Saerang, D. P. ., & Gamaliel, H. (2023). Implementation and Implications of Regional Government Information System ( SIPD ) on Expenditure Administration. *Accounting and Finance Studies*, 3(3), 229–238.
- Kalupe, S., Tahir, A., Arham, M. A., & Aneta, Y. (2025). Optimalisasi Pengadaan Barang / Jasa di Era Digital: Analisis Tantangan dan Peluang di Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO: Jurnal Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–10.
- Kamaluddin, Taryono, & Hartono, R. (2022). Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022. *Jurnal Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa*, 344–357.
- Kusmiati, M. (2024). MANAJEMEN OPERASIONAL JASA 4 . 0. *Cv Aksara Global Akademia*, 1(9), 1–300.
- Massyat, M., Adnan, M. A., & Safriansyah. (2023). Analisis Cascading Kinerja Dan Cross Cutting Program Berbasis Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 57.
- Muhammad. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pelalawan. *Skripsi, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*.
- Mutasari, N., Suardi, W., & Syukuri, U. (2022). Analisis sentimen media sosial: penerapan e- katalog dalam pengadaan barang dan jasa di indonesia. *Praja*, 1(3), 193–200.
- Nuska, I. (2023). Peranan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ( Ukpbj ) Kota Pekalongan dalam Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. *Skripsi, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Purba, S. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengadaan Barang Bidang Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Program Studi Keuangan Daerah*, 1–16.
- Rahmadhanis, A. R. (2024). *Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan Negara Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Mojokerto*.
- Septianingsih, C. A. (2022). Analisis Perencanaan Pengadaan Dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Bagian Layana. *Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 266–279.
- Siregar, D. J. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Grapari Telkomsel Binjai* (pp. 1–104).
- Supusepa, D. (2020). Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Yahukimo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(3), 58–78.